

**EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
DALAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota
Bandarlampung Tahun 2019)**

(Skripsi)

Oleh

SHINTA ARISTA LAMSI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Peningkatan Dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung Tahun 2019)

Oleh

SHINTA ARISTA LAMSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Sugiyono. Lokasi penelitian dilaksanakan di kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilihat dari aspek (1) Ketepatan Sasaran Program, (2) Sosialisasi Program, (3) Tujuan Program, dan (4) Pemantauan Program. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk kata kata dan pernyataan, yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun faktor pendukung dari program KOTAKU adalah ketersediaan dana yang memadai sehingga memudahkan dalam kegiatan pembangunan. Adapun faktor penghambat dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU, kurangnya kerjasama antar institusi pemerintah, institusi pemerintah dengan Koordinator Program KOTAKU, atau Koordinator Program KOTAKU dengan Masyarakat .

Kata Kunci: Efektivitas, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Infrastruktur, Bandarlampung

ABSTRACT

Effectivity of the City without Slums Program (Kotaku) in the Improvement and Development of Infrastructure (study at Kangkung Village Bumi Waras District Bandarlampung city 2019)

By

SHINTA ARISTA LAMSI

The research is aimed to analyze effectivity Cities Without Slums Program (KOTAKU) the improvement and development of infrastructure and to determine the factors supporting and pengh in the implementation of the program. This research uses measurement theory Effectivity according to Sugiyono . Location of research carried out in Kangkung Village Bumi Waras District , Bandarlampung city . Objects were examined in the study this is Effectivity Program Cities Without Slums (Kotaku) that viewed from the aspect (1) Accuracy of program goals , (2) Socialization Program, (3) The purpose of the Program, and (4) Monitoring Program. Research is using the type of research Qualitative with approaches descriptive . Data collection techniques are performed using data collection techniques in the form of words and statements , which include in-depth interviews , observation , and documentation . Data analysis techniques in this study used an analysis model according to Miles and Huberman including data collection , data reduction , data display and conclusion drawing .

KOTAKU program aims to improve access to infrastructure and services base in the area of rundown urban areas to support the establishment of settlements urban areas are worthy of livable , productive and sustainable . The factors supporter of the program KOTAKU is the availability of funds are sufficient to facilitate the activities of development. The factors inhibiting of the KOTAKU program is the lack of participation of the community in the implementation of the activities program Kotaku, the lack of cooperation between the institutions of government , institutions of government with the Coordinator of Program Kotaku, or Coordinator Program Kotaku with Peoples .

Keywords: Effectivity, Cities Without Slums Program (KOTAKU) Infrastructure , Bandarlampung

**EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
DALAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota
Bandarlampung Tahun 2019)**

Oleh

SHINTA ARISTA LAMSI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

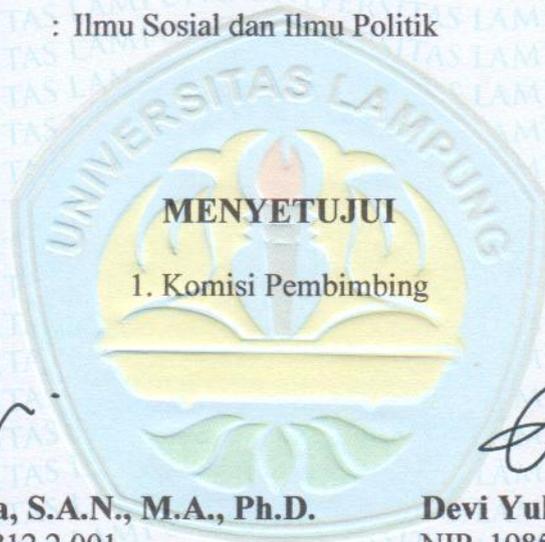
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung Tahun 2019)**

Nama Mahasiswa : **Shinta Arista Jamsi**

No. Pokok Mahasiswa : 1516041023

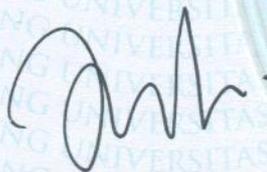
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP 19850620 200812 2 001



Devi Yulianti, S.A.N., M.A.
NIP 19850705 200812 2 004

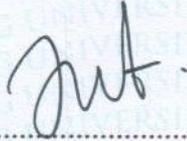
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

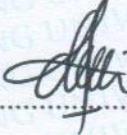


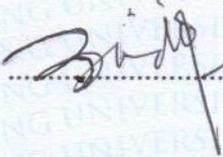
Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

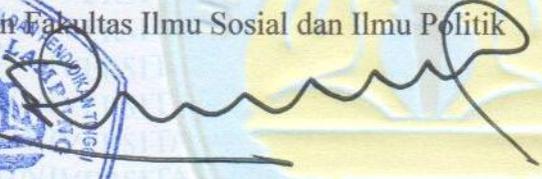
Ketua : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.** 

Sekretaris : **Devi Yulianti, S.A.N., M.A.** 

Penguji Utama : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.** 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Oktober 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandarlampung, 17 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan,



Shinta Arista Lamsi
NPM. 1516041023

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Kota Sungai Penuh pada tanggal 17 April 1998, merupakan putri dari pasangan Bapak Deddy Hartono dan Ibu Darwasi, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dengan adik bernama Hagi Crespo Armanda dan Afif Aditya Fabregas.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 132/III Sumur Anyir pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Kota Sungai Penuh, dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kota Sungai Penuh dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada tahun 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati kuucapkan syukur atas segala karunia dan kasih sayang Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan ridhonya dalam menjalani kehidupan ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Ibuku tercinta Darwasi dan Ayahku tercinta Deddy Hartono, terimakasih atas ketulusan hati untuk selalu mendoakan dan mendukungku sehingga dapat menyelesaikan karya ini, doa dan bimbingan kalian merupakan hal yang terbaik sehingga dapat mengantarkanku sampai pada tahap ini, Ridha Allah bersama kalian.

Adik adikku Tercinta Hagi Crespo Armanda dan Afif Aditya Fabregas. Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu mendukungku.

Serta Para pendidik dan Almamater tercinta

Universitas Lampung

MOTTO

Inspirasi Menjadi Kunci, Agar Semua Mau Berpartisipasi.

*Bahu Membahu Perbaiki Negeri,
Bersama-Sama Mengabdikan Tanpa Henti.*

-Najwa Shihab-

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung Tahun 2019)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Intan Fitri Meutia Ph.D Selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas dukungan, arahan, saran, nasehat, waktu, dan kesabarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

2. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A. selaku pembimbing kedua. Terimakasih atas dukungan, arahan, saran, nasehat, waktu, dan kesabarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku dosen pembahas. Terimakasih atas kritik, saran, arahan, waktu, serta kesabaran yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
4. Ibu Dra. Dian Kagungan M.H. selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas segala motivasi dan sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis terutama dalam proses akademik.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan, semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kedepannya.
8. Segenap informan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Bandarlampung, Pemerintah Kelurahan Kungkung, Koordinator Program

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Kungkung serta Masyarakat Kelurahan Kungkung, yang telah mempermudah penulis dalam mendapatkan data dan informasi tentang penelitian penulis.

9. Ibuku tercinta Darwasi dan ayahku tercinta Deddy Hartono atas kasih sayang yang tidak pernah putus, terimakasih telah mendidik dan membesarkan hingga aku menjadi seperti sekarang. Terimakasih atas kesabaran, dukungan, dan doa yang tiada hentinya untuk masa depan, dan kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, keberkahan rezeki, dan umur yang panjang untuk ibu dan ayahku. Terimakasih banyak, ini semua berkat kalian.
10. Adik-adikku Hagi Crespo Armanda dan Afif Aditya Fabregas yang sangat aku sayangi, terimakasih untuk semangat dan dukungan serta bantuannya selama ini, maaf jika selama ini aku belum bisa menjadi kakak yang baik untuk kalian. semoga kita menjadi orang yang sukses di kemudian hari dan bisa menjadi kebanggaan orang tua kita, aamiin.
11. Untuk Ilham Satria Mandala terima kasih untuk semangat yang selalu kamu berikan, yang selalu membantu, memberi arahan dan yang pasti dukungan sejak aku memasuki masa SMA hingga aku telah menyelesaikan pendidikan di jenjang perkuliahan ini. Dari kamu aku belajar arti kesabaran dan tanggung jawab dalam menjalani hidup. Semoga kebaikan kamu dibalas Allah SWT dan doa ku semoga kamu bisa menjadi guru yang hebat, semangat berjuang 😊
12. Kepada sahabat sahabatku sejak Maba Galuh Tri Wahyuningtyas, Evi Okta Mayasari, Etika Bayu Pratiwi, Devi Ratnasari, dan Intan Purnama

Sari. Terimakasih atas kebersamaannya selama menempuh masa perkuliahan hingga saat ini, terimakasih atas saran, masukan, semangat dan dukungan serta terimakasih sudah mau selalu aku repotkan. Untuk Galuh wanita hebat yang aku kagumi, Terima kasih sudah mengajarkan aku kekuatan dan kesabaran maaf jika selama ini kamu yang paling selalu aku repotkan bahkan sering aku marahi. Untuk Evi orang yang super santai tapi selalu duluin kita, teman pertama aku disaat propti universitas, awal aku kenal orangnya pendiam ngak banyak bicara tapi setelah kenal dekat super kocak dan galak juga :D. Untuk Etika wanita yang kalo bicara paling jarang diantara kita, terima kasih sudah menjadi teman seper-Kosan ku 3 tahun ini. Untuk devi, si kecil menel dan lincah terima kasih sudah menjadi teman yang juga selalu aku repotkan, selalu siap siaga kalo aku butuh bantuan. Dari kamu aku belajar untuk bisa menerima kritik atau masukan dari orang lain. Dan untuk intan wanita yang selalu tiba tiba jutek tanpa melihat kondisi. teman maba aku yang kalo cari perlengkapan propti selalu sama dia karena kita sama sama rantau jadi banyak bingungnya pertama kali datang kelampung. Terima kasih kalian semua yang sudah banyak mengukir cerita di hidup aku. semoga kita dapat menjadi orang yang berhasil, Aamiin.

13. Untuk teman baikku Tyas Ajeng Martha Palupi dan Diantika Arum Legawati. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik dari zaman maba menjadi anggota organisasi hingga saat ini. Dari kalian berdua aku belajar bahwa didalam pertemanan itu tidak boleh menyimpan kepalsuan yakan :D. Kalian hebat, semoga kalian selalu bahagia dan sukses, aamiin.

14. Untuk Apriyana, Maulidya, dan Elva terima kasih sudah menjadi teman yang super kocak yang selalu ngomong pake urat tapi nggak pake rahang :D semangat kerjain skripsinya ya biar cepat nyusul
15. Terima kasih untuk Ririn dan Rima teman sejak masa SMP ku yang selalu semangatku aku walaupun kita berjauhan`. Terima kasih kalian sudah hadir di hidup aku sampai sekarang, Semoga kita sukses dengan apa yang kita cita-citakan. miss you guys!!
16. Teman-teman KKN 2018 di Desa Karang Anom Hasna, Anindhyta, Ega, Wildan, Aswin, dan Bambang. Terimakasih atas kerjasamanya selama proses KKN.
17. Keluarga besar ATLANTIK (Angkatan Tujuh Belas Administrasi Publik) terimakasih untuk kebersamaan dari maba hingga saat ini, semoga kita semua bisa sama-sama sukses, Aamiin.

Serta siapapun yang nantinya membaca skripsi ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Terimakasih.

Bandarlampung, 17 Oktober 2019

Penulis

Shinta Arista Lamsi

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Tinjauan Tentang Program..... | 15 |
| 1. Definisi Program | 15 |
| 2. Tahapan Penyusunan Program | 17 |
| 3. Ciri-Ciri Program yang baik..... | 18 |
| C. Tinjauan Tentang Efektivitas | 18 |
| 1. Definisi Efektivitas | 18 |
| 2. Pengukuran Efektivitas..... | 19 |
| 3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas | 22 |
| D. Tinjauan Tentang Kumuh | 23 |
| 1. Definisi Kumuh | 23 |
| 2. Indikator Kumuh | 24 |
| 3. Ciri-Ciri Kawasan Kumuh | 26 |
| E. Tinjauan Tentang Pembangunan Infrastruktur | 27 |
| 1. Definisi Pembangunan | 27 |
| 2. Tujuan dan Manfaat Pembangunan..... | 29 |
| 3. Definisi Infrastruktur | 30 |
| F. Tinjauan Tentang Tata Ruang..... | 32 |
| 1. Definisi Penataan Ruang | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Asas Penataan Ruang | 34 |
| 3. Klasifikasi Penataan Ruang..... | 35 |
| G. Tinjauan Tentang Tata Kelola Perkotaan..... | 37 |
| 1. Definisi Perkotaan | 37 |
| 2. Tolak Ukur Perkotaan | 38 |
| 3. Kota Layak Huni | 39 |
| H. Tinjauan Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | 40 |
| 1. Definisi Program KOTAKU..... | 40 |
| 2. Tujuan Program KOTAKU | 42 |
| 3. Dasar Hukum Program KOTAKU | 42 |
| 4. Prinsip Program KOTAKU | 44 |
| 5. Keluaran Program KOTAKU | 46 |
| I. Kerangka Pemikiran..... | 47 |
| III. METODE PENELITIAN | 50 |
| A. Pendekatan dan Tipe Penelitian | 50 |
| B. Fokus Penelitian | 51 |
| C. Lokasi Penelitian | 52 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 53 |
| E. Teknik Analisis Data | 56 |
| F. Teknik Keabsahan Data | 58 |
| IV.HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 62 |
| A. Gambaran Umum Kelurahan Kungkung..... | 62 |
| 1. Sejarah Singkat Kelurahan Kungkung..... | 62 |
| 2. Struktur Organisasi Kelurahan Kungkung..... | 64 |
| 3. Keadaan Geografis Kelurahan Kungkung | 65 |
| 4. Potensi Penduduk | 65 |
| 5. Sarana dan Prasarana | 68 |
| 6. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kungkung | 69 |
| B. Hasil Penelitian | 77 |
| 1. Efektivitas Program KOTAKU di Kelurahan Kungkung..... | 77 |
| a. Ketepatan Sasaran Program | 78 |
| b. Sosialisasi Program..... | 79 |
| c. Tujuan Program | 81 |
| 1) Bangunan Gedung | 82 |
| 2) Jalan Lingkungan..... | 84 |
| 3) Penyediaan air minum | 85 |
| 4) Drainase lingkungan | 87 |
| 5) Pengelolaan air limbah | 89 |
| 6) Pengelolaan persampahan..... | 91 |
| 7) Pengamanan kebakaran | 93 |
| 8) Ruang Terbuka Publik/ Ruang Terbuka Hijau | 95 |
| d. Pemantauan Program | 96 |

| | |
|--|------------|
| 2. Faktor pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Kungkung | 99 |
| a. Faktor Pendukung | 99 |
| b. Faktor Penghambat | 100 |
| C. Pembahasan Penelitian | 102 |
| 1. Efektivitas Program KOTAKU di kelurahan Kungkung | 102 |
| a. Ketepatan Sasaran Program | 103 |
| b. Sosialisasi Program | 104 |
| c. Tujuan Program | 106 |
| 1) Bangunan Gedung | 107 |
| 2) Jalan Lingkungan | 109 |
| 3) Penyediaan air minum | 110 |
| 4) Drainase lingkungan | 110 |
| 5) Pengelolaan air limbah | 111 |
| 6) Pengelolaan persampahan | 112 |
| 7) Pengamanan kebakaran | 113 |
| 8) Ruang terbuka publik/ ruang terbuka hijau | 114 |
| d. Pemantauan Program | 117 |
| 2. Faktor Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kungkung | 123 |
| a. Faktor Pendukung | 123 |
| b. Faktor Penghambat | 123 |
| V.SIMPULAN DAN SARAN | 126 |
| A. Simpulan | 126 |
| B. Saran | 128 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Daftar Kawasan Kumuh di Indonesia | 3 |
| 2. Daftar Kawasan Kumuh di Provinsi Lampung | 5 |
| 3. Penelitian Terdahulu | 14 |
| 4. Daftar Informan..... | 54 |
| 5. Daftar Dokumentasi | 56 |
| 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 65 |
| 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 66 |
| 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian | 67 |
| 9. Data Pengurangan Kumuh SK Wali Kota TH 2014 | 70 |
| 10. Jumlah Kawasan Kumuh Berdasarkan RT/Lingkungan | 72 |
| 11. Lokasi Squater Kelurahan Kangkung | 73 |
| 12. Inventarisasi Infrastruktur di Kelurahan Kangkung 2015 - 2018 | 74 |
| 13. Matriks Hasil Penelitian Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kangkung | 120 |
| 14. Matriks Hasil Penelitian Faktor pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Kangkung | 124 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Bagan Kerangka Pikir | 49 |
| 2. Analisis Dara dan Interaksi Antar Komponen | 58 |
| 3. Struktur Organisasi Kelurahan Kangkung | 64 |
| 4. Sosialisasi Program KOTAKU di Kelurahan Kangkung | 81 |
| 5. Kawasan Rumah Kelurahan Kangkung | 83 |
| 6. Jalan Kelurahan Kangkung | 85 |
| 7. Air Minum Kelurahan Kangkung | 87 |
| 8. Drainase Kelurahan Kangkung | 89 |
| 9. Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Kangkung | 91 |
| 10. Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Kangkung | 93 |
| 11. Pemantauan Program KOTAKU di Kelurahan Kangkung dalam metode Kunjungan Lapangan | 98 |
| 12. Pemantauan Program KOTAKU di Kelurahan Kangkung dalam metode Focus Group Discussion (FGD) | 98 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan perkotaan yang upaya penanganannya dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan terus berkembang dan munculnya kawasan kumuh baru apabila tidak ditangani secara intensif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.¹

Salah satu permasalahan permukiman kumuh ditandai dengan meningkatnya kondisi rumah tidak layak huni. Di prediksi pada tahun 2030 sekitar 3 milyar orang atau 40% dari populasi di dunia membutuhkan rumah layak huni dan akses infrastruktur serta layanan dasar seperti sistem air dan sanitasi. Khususnya di Indonesia data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

¹ As'ari, Ruli dan Siti Fadjarani. 2018. Media Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian. Jurnal Geografi Vol. 15 NO.1. Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Menyebutkan bahwa sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga tinggal di dalam kondisi rumah yang tidak layak huni dan terdapat 35.291 ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di prediksi 68% orang Indonesia akan tinggal di Kota pada tahun 2025, sehingga kawasan kumuh terus meningkat.²

Pencegahan dan pengurangan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Penanganan kawasan kumuh secara jelas ditargetkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target terciptanya Kota bebas kumuh di tahun 2019 melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya yang menginisiasi pembangunan kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).³ Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen Permukiman Kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunikasi (Berbasis Komunikasi). Salah satu upaya agar berjalannya program KOTAKU ini yaitu dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan kelompok peduli seperti Lembaga

² Robi Cahyadi Kurniawan. 2018. Opini : Bandar Lampung Kotaku 2020. Setia Lampung

³ <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> diakses pada tanggal 29 September 2018 Pukul 20.15 WIB

Keswadayaan Masyarakat (LKM), akademisi, LSM, Pihak Swasta, maupun Media masa.⁴ Berikut merupakan daftar kawasan kumuh yang ada di Indonesia pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Daftar Kawasan Kumuh di Indonesia

| NO | PROVINSI | LUAS KUMUH (ha) |
|-----|----------------------|-----------------|
| 1. | Aceh | 1.092,06 |
| 2. | Sumatera Utara | 730,41 |
| 3. | Sumatera Barat | 789,89 |
| 4. | Riau | 254,83 |
| 5. | Jambi | 338,87 |
| 6. | Sumatera Selatan | 1.877,44 |
| 7. | Bengkulu | 125,95 |
| 8. | Lampung | 437,43 |
| 9. | Kep. Bangka Belitung | 365,88 |
| 10. | Kep. Riau | 448,23 |
| 11. | DKI Jakarta | 625,22 |
| 12. | Jawa Barat | 3.472,09 |
| 13. | Jawa Tengah | 3.927 |
| 14. | DI Yogyakarta | 348,5 |
| 15. | Jawa Timur | 1.792,59 |
| 16. | Banten | 522,31 |
| 17. | Bali | 80,78 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 697,32 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 202,43 |
| 20. | Kalimantan Barat | 162,85 |
| 21. | Kalimantan Tengah | 92,35 |
| 22. | Kalimantan Selatan | 945,71 |
| 23. | Kalimantan Timur | 771,05 |
| 24. | Kalimantan Utara | 186,37 |
| 25. | Sulawesi Utara | 219,23 |
| 26. | Sulawesi Tengah | 237,66 |
| 27. | Sulawesi Selatan | 1.574,44 |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 609,66 |
| 29. | Gorontalo | 139,65 |
| 30. | Sulawesi Barat | 32,57 |
| 31. | Maluku | 174,04 |
| 32. | Maluku Utara | 47,92 |
| 33. | Papua Barat | 151,78 |
| 34. | Papua | 101,74 |

Sumber : ([http://Kotaku.pu.go.id/pustaka/files/170926_Lokasi_Kumuh_2594/ 171003](http://Kotaku.pu.go.id/pustaka/files/170926_Lokasi_Kumuh_2594/171003) diakses pada 29 September 2018 pukul 20.30 WIB)

⁴ <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> diakses pada tanggal 29 September 2018 Pukul 20.15 WIB

Berdasarkan pada **tabel 1** yang merupakan daftar kawasan kumuh di provinsi yang ada di Indonesia, telah memperlihatkan betapa masih banyaknya kawasan kumuh di Indonesia yang sangat perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang juga masuk kedalam kawasan kumuh di Indonesia. Berdasarkan data pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kawasan kumuh pada Provinsi Lampung seluas 437,43 Ha dimana luas kawasan kumuh di Provinsi Lampung masuk dalam 15 besar kawasan kumuh terluas di Indonesia.

Melalui Program KOTAKU, Provinsi Lampung telah melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh berdasarkan surat keputusan kumuh (SK Kumuh). Adapun kelurahan / desa yang termasuk kriteria kawasan kumuh di Provinsi Lampung ditulis dalam **Tabel 2**.

Tabel 2 Daftar kawasan kumuh di Provinsi Lampung

| Kabupaten/ Kota | Kecamatan | No | Kelurahan/Desa | Luas Kumuh (ha) | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------|
| Lampung Utara | Kota Bumi | 1. | Kota Gapura | 2,77 | |
| | | 2. | Cempedak | 13,42 | |
| | | 3. | Sribasuki | 10,70 | |
| | | 4. | KotaBumi Tengah | 5,36 | |
| | | 5. | KotaBumi Pasar | 3,91 | |
| | | 6. | KotaBumi Udik | 5,92 | |
| | | 7. | Sindang Sari | 11,65 | |
| Total | | | 7 Kelurahan | 53,73 | |
| Pringsewu | Pringsewu | 1. | Pringsewu Utara | 11,70 | |
| | | 2. | Pringsewu Selatan | 12,38 | |
| | | 3. | Pringsewu Barat | 3,25 | |
| | | 4. | Pringsewu Timur | 4,25 | |
| | | Ambarawa | 5. | Jati Agung | 2,50 |
| Total | | | 5 Kelurahan | 34,08 | |
| Bandarlampung | Kedaton | 1. | SukaMenanti Baru | 6,94 | |
| | Tanjung Karang Barat | 2. | SukaJawa Baru | 12,51 | |
| | Panjang | 3. | Srengsem | 1,42 | |
| | | 4. | Panjang Utara | 0,62 | |
| | | 5. | Pidada | 7,08 | |
| | | 6. | Karang Maritim | 1,97 | |
| | | 7. | Way Lunik | 0,53 | |
| | | 8. | Ketapang | 2,66 | |
| | | Tanjung Karang Timur | 9. | Kebon Jeruk | 20,08 |
| | | | 10. | Sawah Lama | 2,51 |
| | | | 11. | Sawah Brebes | 7,62 |
| | | Tanjung Karang Pusat | 12. | Palapa | 7,16 |
| | | | 13. | Pasir Gintung | 9,91 |
| | | | 14. | Kaliawi Persada | 4,03 |
| | | Teluk Betung Selatan | 15. | Talang | 9,33 |
| | | | 16. | Gedong Pakuon | 6,86 |
| | | Teluk Betung Barat | 17. | Negeri Olok Gading | 5,74 |
| | | Suka Bumi | 18. | Campang Jaya | 4,59 |
| | | Way Halim | 19. | Gunung Sulah | 20,65 |
| | | Kedamaian | 20. | Tanjung Agung Raya | 1,10 |
| | | Teluk Betung Timur | 21. | Kota Karang | 20,00 |
| | | | 22. | Kota Karang Raya | 16,60 |
| | | Bumi Waras | 23. | Sukaraja | 42,50 |
| | | | 24. | Bumi Waras | 15,12 |
| | | | 25. | Bumi Raya | 10,14 |
| | | | 26. | Kangkung | 21,03 |
| Total | | | 26 Kelurahan | 258,69 | |
| Metro | Metro Timur | 1. | Iringmulyo | 17,72 | |
| | Metro Pusat | 2. | Imopuro | 27,52 | |
| | | 3. | Hadimulyo Barat | 30,49 | |
| | | 4. | Hadimulyo Timur | 15,20 | |
| Total | | | 4 Kelurahan | 90,93 | |

Sumber : (Koordinator Kota (KorKot)-1 Program KOTAKU Kota Bandarlampung, 2018)

Berdasarkan pada **Tabel 2** memperlihatkan daftar kawasan kumuh yang ada di Provinsi Lampung. Lokasi kawasan kumuh yang ada di Provinsi Lampung terbagi menjadi 4 kabupaten/Kota yaitu Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Lampung Utara. Dimana daerah terbanyak yang memiliki kawasan kumuh berada di Kota Bandar Lampung. Terdapat 26 Kelurahan di Kota Bandar Lampung yang masuk dalam kriteria kawasan kumuh dan tiga teratas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung diantaranya terletak pada kelurahan Sukaraja, Kelurahan Kangkung, dan kelurahan Gunung Sulah.

Sebagai Implementasi percepatan penanganan kumuh di Kota Bandar Lampung melalui program KOTAKU maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan berbagai kegiatan pada entitas kelurahan/desa. Kegiatan penanganan permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk berkelanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik dilokasi permukiman kumuh. Gambaran pelaksanaan program KOTAKU tidak terlepas dari adanya kendala dalam menjalankannya. kendala pertama yang ditemui yaitu penataan kawasan kumuh harus di sesuaikan dan disinergikan dengan RPJMD Kota Bandar Lampung, yang juga di sesuaikan dengan *master plan* wilayah yang tertuang dalam RTRW Kota. Kendala kedua adalah lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk penanganan kawasan kumuh, ketiadaan *master plan* pengembangan kawasan dan lahan, kurangnya ketersediaan dana serta koordinasi

antara sektor terkait.⁵ Menurut penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung kendala utama dalam menjalankan program KOTAKU ini berada pada masyarakat dan pemerintah. Dimana masyarakat sulit untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran untuk merubah kebiasaan mereka dalam melakukan pola hidup yang kumuh pada kawasan yang tidak seharusnya ditempati. ada beberapa masyarakat yang sudah tersentuh program sebelumnya namun kembali hidup dengan pola lama mereka karena lemahnya pengawasan dan keberlanjutan program. Mentalitas dan perilaku masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dengan pola yang baru.⁶

Kendala pada pemerintah terjadi karena kurangnya koordinasi sektor pemerintah. seperti kurangnya kerjasama antara pemerintah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian/ Kehutanan. Serta lemahnya pengawasan dari pihak pihak terkait dan evaluasi program program terdahulu. Evaluasi merupakan satu keharusan dalam menjalankan suatu program karena dengan adanya evaluasi maka pemerintah dapat mengetahui kendala apa saja yang ada dalam program yang dijalankan dan dapat dijadikan acuan pembelajaran dalam menjalankan program berikutnya. Menurut Djaali evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang di evaluasi. Evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.⁷ Sedangkan Ahmad dalam Muryadi mengatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu

⁵ Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung, 23 November 2018 Pukul 10.00 WIB

⁶ Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung, 23 November 2018 Pukul 10.00 WIB

⁷ Djaali, mulyono pudji dan ramly. 2000. Hal 3. Pengukuran dalam bidang pendidikan. Pascasarjana Universitas negeri Jakarta. jakarta

(ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dan lain-lain) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.⁸ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Dalam melakukan penilaian keberhasilan sebuah program evaluasi memiliki beberapa kriteria salah satunya yaitu efektivitas.

Menurut James L Gibson dkk dalam Pasolong efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.⁹ Menurut daft dalam Dipta Kharisma menjelaskan efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan dari suatu program semakin besar maka semakin besar pula efektivitasnya. Namun apabila setelah pelaksanaan program ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah di hadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu program tersebut telah gagal.¹⁰

Program KOTAKU di Kota Bandarlampung bermula dari program penanggulangan kemiskinan, melalui pemberdayaan dan dengan penanganan

⁸ Agustanico Dwi Muryadi. 2017. Hal 133 Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. Jurnal Ilmiah Penjas, ISSN : 2442-3874 Vol. 3 No.1. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

⁹ Pasolong.2013. Hal 4. Teori administrasi publik. Alfabeta. Bandung

¹⁰ Dipta Kharisma, Tri Yuniningsih.2017. Efektivitas organsisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Semarang. Universitas Diponegoro

kegiatan kelembagaan. Dalam perjalanan program KOTAKU di Kota Bandarlampung yang telah berlangsung dari Oktober 2016 hingga November 2018 sudah mulai terlihat progresnya. Dengan adanya peningkatan perbaikan infrastruktur, sumber daya manusia, serta ekonomi masyarakat yang dijalankan pemerintah Kota Bandarlampung menjadikan luas kawasan kumuh di Kota Bandarlampung perlahan mulai berkurang. Perbaikan infrastruktur yang dijalankan pemerintah Kota Bandarlampung seperti perbaikan jalan lingkungan, Drainase, serta Sanitasi. Sedangkan peningkatan ekonomi seperti bantuan dana pinjaman stimulan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga kawasan kumuh di Kota Bandarlampung untuk akhir tahun 2018 ini hanya tinggal sekitar 30% yang belum terselesaikan.¹¹

Pemerintah Kota Bandarlampung berupaya agar dengan disalurkannya Program KOTAKU ini diharapkan mampu memberikan hunian yang layak bagi masyarakat Kota Bandarlampung terutama bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh. Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh adalah dengan 3 cara arah kebijakan penanganan kawasan kumuh yaitu : menciptakan lingkungan yang memungkinkan, mengurangi lingkungan permukiman kumuh, dan mencegah pembentukan kumuh baru.¹² Tujuan Umum Program KOTAKU ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan

¹¹ Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung, 23 November 2018 Pukul 10.00 WIB

¹² <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> diakses pada 10 oktober 2018 pukul 21.30 WIB

berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.¹³

Berdasarkan tujuan dari Program KOTAKU tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji terkait efektivitas dari program tersebut dalam peningkatan serta pembangunan infrastruktur di Kota Bandarlampung dan hasil dari program KOTAKU. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian tentang **“Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung Tahun 2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur?

¹³ <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> diakses pada 10 oktober 2018 pukul 21.30 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya penelitian tentang ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan konsep Kebijakan Publik, Evaluasi kebijakan, dan Efektivitas.
2. Manfaat Praktis, dapat menjadi bahan masukan atau bahan informasi bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mendalami mengenai efektivitas kebijakan publik, serta sebagai bahan masukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat judul “ Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Peningkatan Dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung Tahun 2019)” . dalam melakukan penelitian perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Terdapat tiga hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh yang telah dikaji sebelumnya sebagai berikut :

1. Almas Zuhruas.2017 Peranan Program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi.

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana peranan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai media pendidikan sosial untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program kerja KOTAKU melibatkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan keswadayaan secara bersama-sama. hasil implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan keberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat belum dapat berjalan secara maksimal dan belum sepenuhnya seluruh program dapat berjalan sesuai rencana.

2. Afyah Ulya.2018.Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Penelitian ini menggambarkan tentang partisipasi masyarakat dalam menjalankan program Kota tanpa kumuh di Kelurahan Krobokan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang terdiri dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam evaluasi serta partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil program. karena sasaran utama penggerak program kotakku berada pada masyarakat.

3. Dewi Zulyanti.2017. Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandarlampung.

Penelitian ini menggambarkan implementasi program KOTAKU di Negeri Olok Gading dilaksanakan dalam 4 tahap utama pembangunan yaitu,(1) tahap persiapan dimana dalam tahap ini terdiri dari sosialisasi dan pembentukan LKM melalui pemilihan dari masyarakat, (2) tahap perencanaan, dalam tahap ini terdiri dari penetapan jadwal rencana kerja masyarakat dan penyusunan anggaran dana, (3) tahap pelaksanaan, dalam tahap ini terdiri dari langkah langkah pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan barang kemudian pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan terakhir (4) tahap evaluasi didalamnya terdapat musyawarah yang

membahas laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pembentukan KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan).

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

| No. | Penelitian, Tahun, Judul | Metode | Isi | Relevansi |
|-----|---|---|--|--|
| 1. | Almas Zuhruas.2017 Peranan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi. | Metode penelitian deskriptif kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program kerja KOTAKU melibatkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan keswadayaan secara bersama-sama. hasil implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan keberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat belum dapat berjalan secara maksimal dan belum sepenuhnya seluruh program dapat berjalan sesuai rencana. | Persamaan : Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Perbedaan : Tujuan penelitian dan Lokasi Penelitian , penelitian ini lebih fokus pada peningkatan keberdayaa ekonomi |
| 2. | Afyah Ulya.2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang | Metode penelitian deskriptif kualitatif | Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang terdiri dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam evaluasi serta partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil program. karena sasaran utama penggerak program kotaku berada pada masyarakat. | Persamaan : mengkaji tentang kawasan permukiman kumuh, dan penanganan permukiman kumuh Perbedaan : lokasi penelitian, penelitian ini lebih fokus pada partisipasi masyarkat dalam pelaksanaan program |
| 3. | Dewi Zulyanti.2017. Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis | Metode penelitian deskriptif kualitatif | implementasi program KOTAKU di Negeri Olok Gading dilaksanakan dalam 4 tahap utama pembangunan yaitu,(1) tahap persiapan dimana | Persamaan : tujuan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur melalui program kotaku |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | Masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. | | dalam tahap ini terdiri dari sosialisasi dan pembentukan LKM melalui pemilihan dari masyarakat, (2) tahap perencanaan, dalam tahap ini terdiri dari penetapan jadwal rencana kerja masyarakat dan penyusunan anggaran dana, (3) tahap pelaksanaan, dalam tahap ini terdiri dari langkah langkah pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan barang kemudian pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan terakhir (4) tahap evaluasi didalamnya terdapat musyawarah yang membahas laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan pembanguan infrastruktur dan pembentukan KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan). | Perbedaan : penelitian ini lebih ditekankan pada pelaksanaan dan penerapan program |
|--|---|--|---|--|

B. Tinjauan Tentang Program

1. Definisi Program

Menurut Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida mengemukakan program sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh¹⁴. Hasibuan juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu

¹⁴ Farida Rahim.2008.Hal 9. *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*. Bumi Aksara : Jakarta

pelaksanaan yang telah ditetapkan.¹⁵ Program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu ¹⁶:

a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

b. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

¹⁵Hasibuan, Malayu S.P 2006, Hal 72. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara : Jakarta

¹⁶ Siti Erna Latifi. 2009. Hal 28. Implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di kabupaten aceh tamiang. Tesis. Universitas lampung. bandarlampung

c. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

2. Tahapan Penyusunan Program

Program merupakan bagian dari pencapaian tujuan perencanaan kebijakan (*policy planning*) pada tingkat Kabinet. Berdasarkan hal ini, kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan harus didasarkan dalam rangka pencapaian kinerja dampak (*impact*) dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian prioritas pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Kementerian / Lembaga pada tingkat organisasi. Kerangka pikir penyusunan program diturunkan berdasarkan *Logic Model Theory*. Pengembangan kerangka pikir akan menjadi arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing Kementerian / Lembaga. Dalam penyusunan program dilakukan melalui 7 tahapan sebagai berikut: ¹⁷

- a. Identifikasi Visi Misi dan sasaran strategis kementerian/lembaga
- b. Identifikasi Kinerja Kementerian / Lembaga (*Impact*) dan indikator kinerja Kementerian / Lembaga
- c. Penyusunan indikator kinerja program (*outcome*)
- d. Penamaan program
- e. Penyusunan indikator kinerja kegiatan (*output*)
- f. Penamaan kegiatan
- g. Rekapitulasi program, kegiatan dan indikator kinerja Kementerian / Lembaga

¹⁷(https://www.bappenas.go.id/files/8913/6508/2376/modul-ii__20090814165601_1.pdf/ diakses pada 16 januari 2019. Pukul 17.30 WIB)

3. Ciri-ciri Program yang baik

Siagian mengatakan bahwa “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”. Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ¹⁸

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungankeuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut

C. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Menurut Mahmudi efektivitas sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending*

¹⁸ Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management)* Jilid 2. Toko Gunung Agung : Jakarta

wisely.¹⁹ Menurut Sedarmayanti efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.²⁰ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu hasil dan tujuan yang sudah direncanakan dan tolak ukur sejauh mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan atau fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah

¹⁹ Mahmudi. 2005. Hal 92. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YPN : Yogyakarta

²⁰ Sedarmayanti. 2006. Hal 61. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*, Cetakan II. Mandar Maju : Jakarta

ditetapkan.²¹ Untuk itu perlu diketahui kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Siagian yang meliputi :²²

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. Penyusunan program yang matang
- e. Penyusunan program yang mantap
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Pelaksanaan efektif dan efisien
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Pendapat lain, Sugiyono dalam Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :²³

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.²⁴

²¹ Ulum, Ihyaul MD. 2004. Hal 294. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press : Malang

²² Siagian, Sondang P. 2004. Hal 77. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management)* Jilid 2. Toko Gunung Agung : Jakarta

²³ Budiani, Ni Wayan. 2007. Hal 53. Efektivitas Program Penanggulangan pengangguran karang taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2 No.1

²⁴ Makmur, 2011. Hal 8. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung

- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.²⁵ menurut Siagian menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁶

²⁵ Winardi, 2007. Hal 7. *Manajemen Perilaku Organisasi*, Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

²⁶ Siagian, Sondang P. 2004. Hal 78. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management)* Jilid 2. Toko Gunung Agung : Jakarta

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ukuran efektivitas adalah bagaimana tujuan dari program atau kebijakan dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, terjadi perubahan dari sebelum program dilaksanakan, saat program dilaksanakan dan setelah program dilaksanakan, dan sosialisasi program, serta tingkat kesejahteraan meningkat. Dalam melakukan pengukuran efektivitas peneliti menggunakan indikator-indikator menurut Sugiyono dalam Budiani melalui Ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan Program. Karena dengan menggunakan teori ini penulis dapat mengukur efektivitas yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti yaitu efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam peningkatan dan pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kangkung Kecamatan bumi waras Kota Bandarlampung.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Hasibuan mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program, antara lain :²⁷

- a. Kualitas Aparatur adalah kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
- b. Kopetensi Administator menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.
- c. Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. faktor sarana dan prasarana di artikan

²⁷ Hasibuan, Malayu S.P. 2006.Hal 44.*Manajemen Sumber daya Manusia*. Edisi Revisi. Bumi Aksara : Jakarta

sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

- d. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

D. Tinjauan Tentang Kumuh

1 Definisi Kumuh

Menurut Adisasmita Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap, tingkah laku dan pola sosial budaya yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Kumuh diartikan sebagai daerah dengan tingkat kepadatan populasi tinggi disebuah Kota yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dengan bangunan bangunan perumahan yang tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hunian hunian yang sehat. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau pandangan yang diberikan golongan menengah keatas terhadap golongan bawah.²⁸

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. permukiman kumuh diartikan sebagai suatu lingkungan yang telah mengalami

²⁸ Adisasmita, Rahardjo. 2010. Hal 5. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu : Yogyakarta

penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang tidak mungkin dicapai kehidupan yang layak bagi penghuninya bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar benar dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya.²⁹

2. Indikator Kumuh

Pada umumnya dalam menentukan suatu daerah itu dapat di katakan kumuh dapat dilihat dengan beberapa indikator antara lain :³⁰

2.1 Bangunan gedung

- a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk;
- b. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
- c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.

2.2 Jalan Lingkungan

- a. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;
- b. Lebar jalan yang tidak memadai;
- c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai.

2.3 Penyediaan air minum

- a. Ketidaktersediaan akses air minum;
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
- c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.

²⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

³⁰ (<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> diakses pada 10 oktober 2018 pukul 21.30 WIB)

2.4 Drainase Lingkungan

- a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
- b. Menimbulkan bau;
- c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.

2.5 Pengelolaan Air Limbah

- a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah;
- b. Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
- c. Tercemarnya lingkungan sekitar.

2.6 Pengelolaan Persampahan

- a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan;
- b. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.

2.7 Pengamanan Kebakaran

- a. Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif
- b. Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
- c. Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.

2.8 Ruang Terbuka Publik

- a. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH)
- b. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau/ ruang terbuka public (RTP)

3. Ciri-ciri Kawasan Kumuh :

Ciri ciri permukiman kumuh dari segi fisik, segi sosial, segi hukum dan segi ekonomi menurut Adisasmita :³¹

a. Dari Segi Fisik

Pada umumnya ukuran persil dan tanah sempit serta di bawah standar dalam arti *ratio* luas ruang tempat tinggal per satu jiwa sangat rendah, pola penggunaan tanah tak teratur, letak dan bentuk bangunan tidak teratur, prasarana fisik lingkungan seperti air minum, drainase, air limbah dan sampah di bawah standar atau sama sekali tidak ada. Kesehatan lingkungan sangat rendah, kurang sempurnanya pembuangan air limbah rumah tangga dan sampah sehingga sering terkena wabah penyakit. Jaringan jalan internal tidak beraturan, kondisi bangunan pada umumnya terbuat dari material temporer atau semi permanen dan umumnya dalam keadaan kurang memenuhi syarat.

b. Dari Segi Sosial

Lingkungan yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang padat dalam area yang terbatas. Mayoritas pendapatan penduduk rendah, tingkat pendidikan masyarakat rata rata rendah, hubungan antar individu kegotoroyongannya lebih menonjol dibandingkan masyarakat pada bagian Kota lainnya.

³¹ Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu : Yogyakarta

c. Dari Segi Hukum

Sebagian besar kawasan kumuh umumnya terbentuk tanpa melali prosedur perundang – undangan yang ada. Hal ini disebabkan karena langka dan mahal nya harga lahan di perkotaan.

d. Dari segi Ekonomi

Umumnya terdiri dari masyarakat dengan pola mata pencaharian yang heterogen, tingkat produktivitas dan kesehatan lingkungan rata rata rendah, sektor perekonomian bersifat informal seperti penarik becak, buruh, pedagang kaki lima, nelayan dan lainnya. Tingkat keinginan menabung penduduk umumnya rendah karena tingkat pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

E. Tinjauan Tentang Pembangunan Infrastruktur

1. Definisi Pembangunan

Era modernisasi saat ini pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu konsep-konsep serta definisi-definisi pembangunan dapat memunculkan teori seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Todaro pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.³² Menurut Siagian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,

³² Todaro, Michael P. 2006. Hal 18. *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan Jilid I)* Erlangga : Jakarta

negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dari definisi di atas akan muncul tujuh ide pokok pembangunan antara lain: ³³

1. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka waktu pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, yang dimana dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan pembangunan
5. Pembangunan mengarah modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional.
7. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga semakin kukuh fondasinya dan menjadi negara yang sejajar dengan bangsa lain.

Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun

³³ Siagian, Sondang P. 2004. Hal 90. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management)* Jilid 2. Toko Gunung Agung : Jakarta

sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak.

2. Tujuan dan Manfaat Pembangunan

Tujuan dan Manfaat Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Artinya melanjutkan apa yang telah dibangun, membangun yang belum dibangun dan menambah bagian-bagian baru sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip pembangunan seperti ini yang perlu dilaksanakan dalam sebuah kepemimpinan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam aktivitas pemerintahan. Tujuan utama pembangunan bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan dan pengurangan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Tiga tujuan inti pembangunan adalah :³⁴

- a. peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan
- b. peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan

³⁴ Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan Jilid I)* Erlangga : Jakarta

- c. perluasan rentang pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa, yakni membebaskan mereka dari ketergantungan

3. Definisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula dalam kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi, dan utilitas publik. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38/ 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

The World Bank dalam Prasetyo dan Firdaus membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu:³⁵

1. Infrastruktur ekonomi

infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi, *public utilities* berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sanitasi dan *public work* berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan seterusnya.

2. Infrastruktur sosial

Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan.

3. Infrastruktur administrasi

Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegakan hukum.

Sebagai kebutuhan dasar fisik, infrastruktur memerlukan pengorganisasian sistem struktur untuk jaminan ekonomi di sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan berupa infrastruktur fisik dan sosial agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah infrastruktur ini lebih mengarah ke infrastruktur teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas jalan, air bersih, perlistrikan, telekomunikasi, pengolahan limbah, bandara, waduk, tanggul, kanal, kereta api secara fungsional dapat memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting dalam keberadaan perekonomian suatu negara sebagai pendorong produktivitas output dan melakukan kegiatan ekonomi. Namun disisi lain ada dua kendala dalam pengadaan infrastruktur yaitu kemungkinan ada kegagalan pasar (*market failure*) dan pembiayaan. Kegagalan pasar ini dikarenakan jenis

³⁵ Prasetyo, dan firdaus, Muhammad. 2009. Hal 222. Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. jurnal JEKP Vol 2 no2 mei 2009. Institute pertanian bogor

infrastruktur memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan secara pribadi namun juga dapat dirasakan oleh orang lain. Maka dengan kendala tersebut pemerintah mengadakan infrasktruktur melalui pengeluaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pembangunan negara.

F. Tinjauan Tentang Tata Ruang

1 Definisi Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.³⁶ Budiharjo mengemukakan bahwa manusia memegang peranan penting dalam mengatur pemanfaatan ruang. Penyimpangan terjadi akibat ledakan penduduk yang tidak terkendali. Oleh sebab itu perencanaan tata ruang merupakan metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan Kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan, rencana tata ruang nasional, sampai tingkat internasional.³⁷

³⁶ UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

³⁷ Budihardjo, Eko. 1999. Hal 32. *Kota Berkelanjutan*. Penerbit Alumni : Bandung

Menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Penataan ruang berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan.³⁸ Penataan ruang diatur berdasarkan fungsi utama kawasan dan terdiri atas kawasan lindung seperti suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan sebagainya, serta kawasan budidaya seperti industri, permukiman, pertanian. Penataan ruang meliputi ruang wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/ Kota yang dalam penyusunannya melalui hirarki dari tingkat yang paling atas ke tingkat yang paling bawah agar penataan ruang bisa dilakukan secara terpadu.

Sasaran utama dari perencanaan tata ruang pada dasarnya adalah untuk menghasilkan penggunaan lahan terbaik, namun biasanya dapat dikelompokkan atas tiga sasaran umum, yaitu : efisiensi, keadilan dan akseptabilitas masyarakat, dan keberlanjutan. Sasaran efisiensi merujuk pada manfaat ekonomi, dimana dalam konteks kepentingan publik pemanfaatan ruang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata ruang harus merupakan perwujudan keadilan dan melibatkan partisipasi masyarakat, oleh karenanya perencanaan yang disusun harus dapat diterima oleh masyarakat. Perencanaan tata ruang juga harus berorientasi pada keseimbangan fisik lingkungan dan sosial sehingga menjamin peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (*sustainability*).

³⁸ Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2 Asas Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

- c. Keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

e. Keterbukaan.

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f. Kebersamaan dan kemitraan.

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h. Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

3 Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan,

wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut:

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/Kota.
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
- c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/Kota harus dilakukakn secara berjenjang dan komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah tindih kewenangan.

G.Tinjauan Tentang Tata Kelola Perkotaan

1 Definisi Perkotaan

Kota (*city*) adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status administrasi sebagai sebuah Kota, baik Kota kecil, Kotamadya maupun Kota metropolitan. Adisasmita menyatakan bahwa pada umumnya Kota diartikan sebagai suatu wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi pemerintahan.³⁹ Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa suatu Kota meliputi konsentrasi daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan dengan kepadatan yang relatif tinggi dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan nonpertanian, seperti industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Pembangunan ruang perkotaan bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, baik dalam kualitas maupun kuantitas dan (2) memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

³⁹ Adisasmita, Rahardjo. 2010.Hal 12.. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu : Yogyakarta

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pembangunan kota harus diupayakan untuk lebih meningkatkan produktifitas yang dapat mendorong sektor-sektor perekonomian, akan tetapi pengembangannya perlu memperhatikan ketersediaan sumberdaya, agar pemanfaatan sumberdaya untuk pelayanan sarana dan prasarana kota lebih efisien. Pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan mengacu pada pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak merusak kekayaan budaya daerah. Hal tersebut juga diperlukan agar tercipta keadilan yang tercermin pada pemerataan kemudahan dalam memperoleh penghidupan perkotaan, baik dari segi prasarana dan sarana maupun dari lapangan pekerjaan.

2 Tolak Ukur Perkotaan

Perkotaan adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Menurut Restina ada 10 kriteria/tolak ukur Kota antara lain sebagai berikut :

- a. ukuran dan jumlah penduduk yang besar terhadap massa dan tempat
- b. bersifat permanen,
- c. Kepadatan minimum terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah,
- d. struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan jalur jalan dan ruang perkotaan yang nyata,
- e. tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja,

- f. fungsi perkotaan minimum meliputi pasar, pusat administrasi atau pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat aktivitas intelektual,
- g. heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat,
- h. pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian ditepi Kota dan memeroses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas,
- i. pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat,
- j. pusat penyebaran.⁴⁰

3. Kota Layak Huni

Kota layak huni adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu Kota. Menurut Kevin Lynch dalam Beby.S.D menyatakan Kota yang ideal haruslah memenuhi beberapa syarat penting, misalnya transportasi yang memadai, sarana kesehatan, sarana air bersih, lingkungan tempat tinggal yang memberikan akses kemudahan bagi para warga mulai dari balita hingga orang tua lanjut usia, akses pekerjaan serta rumah dan permukiman layak tinggal bagi para warganya.⁴¹ Dalam mewujudkan Kota yang layak huni atau *Livable city* harus mempunyai prinsip prinsip dasar. Prinsip dasar ini harus dimiliki oleh Kota Kota yang ingin menjadikan Kotanya sebagai Kota yang layak huni dan nyaman bagi masyarakat Kota.

⁴⁰ Restina, N. 2009. Hal 56. *Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting dan Arahan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat*. Tesis. Institut Pertanian Bogor : Bogor

⁴¹ Beby.S.D. Banteng.2015. *Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan Studi Kasus Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo

Menurut Lennard Prinsip dasar untuk *Livable city* adalah tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat, fasilitas umum dan sosial, ruang dan tempat publik, aman, mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya, serta sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik. Kota yang layak huni adalah Kota yang terdiri dari banyak nya ruang terbuka hijau, dapat menampung banyak masyarakat, memiliki lingkungan yang aman dan mendukung kebutuhan manusia seperti fasilitas umum dan sosial, penyediaan lapangan pekerjaan.

H. Tinjauan Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

1. Definisi Program Kotaku

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/ Kota di 34 provinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, Kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya⁴² Program Kotaku disosialisasikan secara nasional oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 26 April 2016 Kemudian masing masing wilayah mensosialisasikan ke wilayah masing masing. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kawasan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

⁴² (<http://ktaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>. Diakses pada 5 oktober 2018 pukul 14.57 WIB).

Program Kotaku diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat Kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen . Program KOTAKU ini merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu PNPM-MP. PNPM Mandiri Perkotaan memiliki tujuan dan sasaran untuk terbangunnya lembaga di tingkat masyarakat yang berbasis nilai universal kemanusiaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian meningkatnya akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial, prasarana hingga pendanaan untuk pengembangan usaha atau permodalan. Selain itu juga untuk mendorong pemerintah daerah atau pemerintah Kota agar semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Perbedaannya Program PNPM MP dan Program KOTAKU ini adalah pada tujuannya, Program KOTAKU bertujuan untuk mencegah dan menangani permukiman kumuh. Sedangkan program PNPM-MP ini bertujuan untuk meningkatkan akses sosial untuk masyarakat miskin serta memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Namun kedua program ini juga tetap bertujuan dan berfokus pada masyarakat miskin, yaitu untuk meningkatkan kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi masyarakat miskin.

2. Tujuan Program Kotaku

Tujuan Program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan langkah sebagai berikut :

- a. Menurunnya luas Kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/Kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
- c. Tersusunnya rencana Penangan Kumuh tingkat Kota/ kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

3. Dasar Hukum Program KOTAKU

Dasar Hukum program KOTAKU berdasarka Pada Landasan Konstitusional UUD 1945 dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan Program KOTAKU yang akan disusun kemudian. Dasar Hukum program KOTAKU diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 : “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
- b. UU Nomor 1 Tahun 2011 : Penanganan Permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau setiap orang.
- c. UU Nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
- d. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
- e. UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan permukiman
- f. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- g. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- h. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i. Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Strategi pelaksanaan kebijakan, implementasi percepatan penanganan kumuh 2016-2019
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah
- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030
- l. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025.
- m. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

4.Prinsip Program KOTAKU

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Kotaku di antaranya adalah:

- a. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda. Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sector maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.
- b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program). Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/Kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).
- c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/ Kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat Kota/ kabupaten dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat Kota/ kabupaten mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkot/ Pemkab hingga pemerintah desa dan Kecamatan.
- d. Partisipatif pembangunan dengan memadukan perencanaan dari atas (*Top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat

akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/ tingkat Kota.

- e. Kreatif dan Inovatif. Prinsip Kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide ide dan cara cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.
- f. Pengelolaan lingkungan dan sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial program KOTAKU
- g. Tata Kelola Pemerintah yang baik (*Good Governance*) prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/ kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*)
- h. Investasi Penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan Kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan
- i. Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

5. Keluaran Program KOTAKU

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut;⁴³

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- b. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
- c. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat Kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU;
- d. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh ; dan
- e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

⁴³ (<http://ktaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>. Diakses pada 5 oktober 2018 pukul 14.57 WIB).

I.Kerangka Pemikiran

Permasalahan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya namun masih saja banyak dijumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut Kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. permasalahan permukiman kumuh menjadi kekhawatiran pemerintah sehingga di keluarkanlah Undang Undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan menjadi kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak.

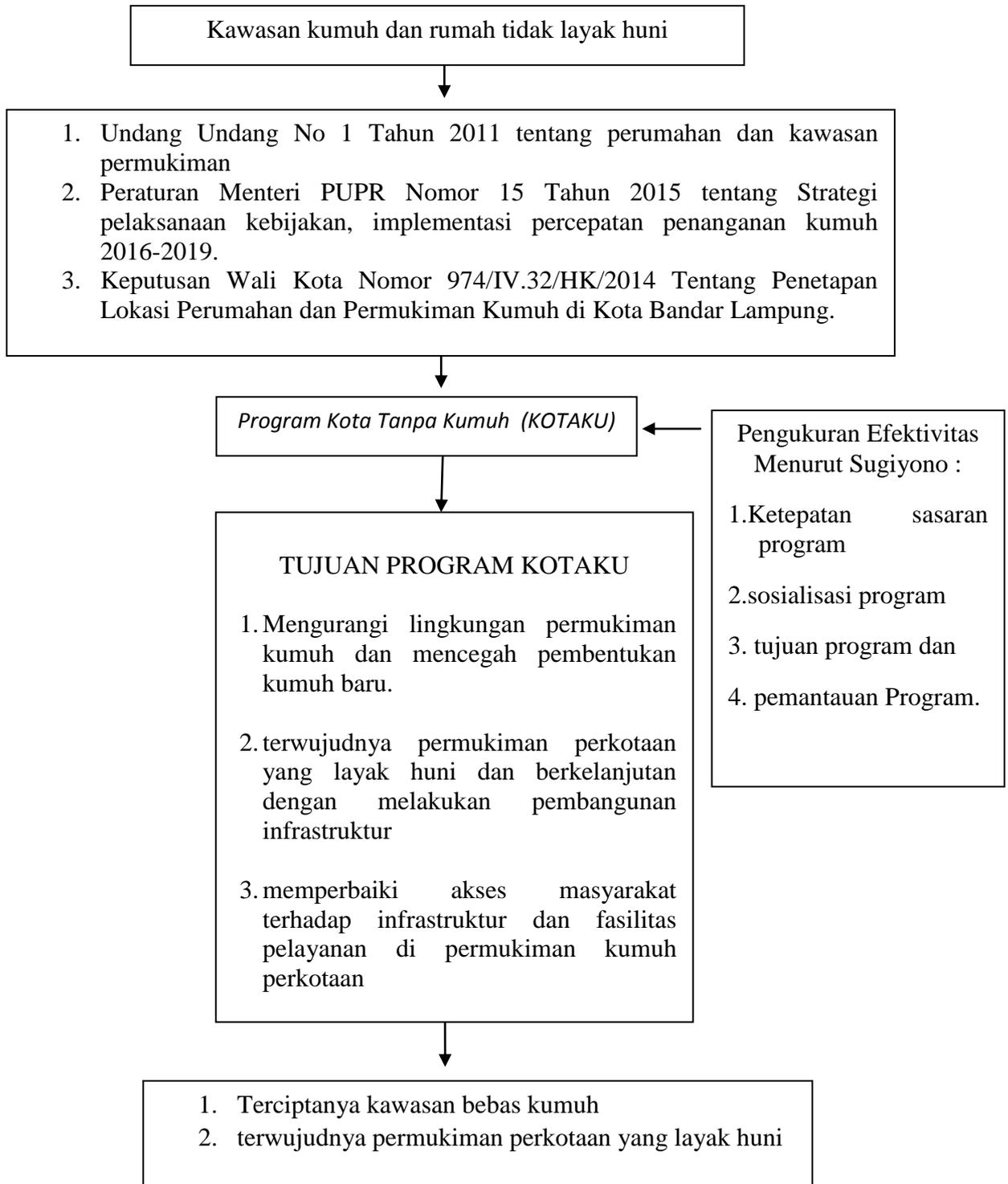
Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berjenjang dari Menteri hingga pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk seluruh aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Strategi pelaksanaan kebijakan, implementasi percepatan penanganan kumuh 2016-2019. Menanggapi hal tersebut Kota Bandarlampung berupaya untuk terus melakukan pengurangan pemukiman kumuh, salah satu cara yang dilakukan untuk menangani kawasan kumuh adalah dengan mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas perumahan yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan

kualias terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.dan Keputusan Wali Kota Nomor 974/IV.32/HK/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandarlampung.

Program KOTAKU merupakan langkah yang di ambil pemerintah sebagai cara untuk menangani kawasan kumuh. Adapun tujuan program KOTAKU adalah untuk mengurangi lingkungan permukiman kumuh dan mencegah pembentukan kumuh baru, terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan dengan melakukan pembangunan infrastruktur serta memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Agar tujuan dari program KOTAKU dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal program maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai yang telah di rencanakan dan di ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program KOTAKU di Kelurahan Kangkung menggunakan ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sugiyono (dalam Budiani) yaitu 1) ketepatan Sasaran Program, 2) Sosialisasi Program, 3) Tujuan Program dan 4) Pemantauan Program. Dengan menggunakan teori ini dapat mengukur efektivitas program KOTAKU berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sebelumnya.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



Sumber : diolah oleh peneliti , 2018

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek/objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Metodologi Penelitian terdapat beberapa pokok yang akan dibahas yaitu Pendekatan dan Tipe Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Data.

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Lebih

⁴⁴ Moleong, Lexy J. 2017. Hal 4. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya :Bandung

lanjut Moleong mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁴⁵

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Badarlampung serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti membutuhkan narasumber untuk kemudian dilakukan wawancara mendalam dan juga observasi untuk mendapatkan data data yang valid dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan dan menganalisis wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Badarlampung

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Fokus penelitian merupakan batasan-batasan masalah yang diteliti dan mengarahkan peneliti agar tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur

⁴⁵ Moleong, Lexy J. 2017.. Hal 11 *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya :Bandung

yang diukur dengan standar pengukuran efektivitas program KOTAKU menurut Sugiyono yaitu :

- a. ketepatan sasaran program
 - b. sosialisasi program
 - c. tujuan program
 - d. pemantauan Program.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Faktor pendukung dan penghambat efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Badarlampung

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong cara terbaik yang perlu ditempuh dalam menentukan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian; untuk itu pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁴⁶ Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras kota Bandarlampung sebagai lokasi penelitian berdasarkan dengan beberapa alasan diantaranya adalah di desa ini masih banyak terdapat Pemukiman Kumuh dan dari data yang telah peneliti dapatkan Kelurahan Kangkung merupakan kawasan kedua di kota bandarlampung yang

⁴⁶ Moleong, Lexy J. 2017. Hal 128. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya :Bandung

memiliki luas kawasan terkumuh yakni 21,03 Hektar sehingga kecamatan ini merupakan salah satu objek pelaksanaan program KOTAKU di kota Bandar Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Menurut Moleong Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁷ Menurut Tresiana dalam wawancara kita dihadapkan kepada dua hal : pertama, kita harus secara nyata mengadakan interaksi dengan informan, kedua, kita menghadapi kenyataan, adanya pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan pandangan kita sendiri. Karenanya masalah yang kita hadapi ialah, *“bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita mengolah pandangan yang mungkin berbeda itu”*.⁴⁸

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung, Koordinator Program KOTAKU Kota Bandarlampung, Pemerintah Kelurahan Kangkung, dan Masyarakat Kelurahan Kangkung. Berikut penulis sajikan tabel informan di bawah ini

⁴⁷ Moleong, Lexy J. 2017.. Hal 186 *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya :Bandung

⁴⁸ Tresiana, Novita 2013 Hal 97. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Bandarlampung

Tabel 4. Daftar Informan

| No | Nama | Jabatan | waktu | Keterangan/ Informasi |
|----|---|--|------------------------------|--|
| 1. | Jhoni Asman, S.T., M.T | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung | 25 April 2019 Pukul 10.00 | Penyusun rencana kerja dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman |
| 2. | Benny Arby Umran, S.Kom., S.Pd., M.Pd.I | Koordinator Kota (KorKot)-1 Program KOTAKU Kota Bandar Lampung | 9 Mei 2019 Pukul 10.30 | Mengetahui koordinasi pelaksanaan program, presentase keberhasilan program dan keberlanjutan program. |
| 3. | Doni Irawan, S.T | Askot Infrastruktur Program KOTAKU Kota Bandar Lampung | 9 Mei 2019 Pukul 11.00 | Mengetahui infrastruktur-infrastruktur yang di jalankan dalam Program KOTAKU |
| 4. | Rio Kurniawan, S.T | Askot Urban Planner Program KOTAKU Kota Bandar Lampung | 3 Juni 2019 Pukul 11.00 | Mengetahui pengurangan data kawasan kumuh dan persentase keberhasilan program |
| 5. | Drs. Tajeri | Koordinator Program KOTAKU di Kelurahan Kangkung | 5 Juni 2019 Pukul 09.00 | Hasil pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kangkung, tanggapan dari pihak penerima program/ partisipasi masyarakat dengan adanya program |
| 6. | Samsudin | Masyarakat Kelurahan Kangkung | 17 Mei 2019 Pukul 09.00 | Mengetahui keberadaan program di dalam lingkungan masyarakat, Manfaat yang dirasakan masyarakat dan dampaknya bagi lingkungan masyarakat |
| 7. | Dendi | Masyarakat Kelurahan Kangkung | 17 Mei 2019 Pukul 09.30 | Mengetahui keberadaan program di dalam lingkungan masyarakat, Manfaat yang dirasakan masyarakat dan dampaknya bagi lingkungan masyarakat |
| 8. | Yanti | Masyarakat Kelurahan Kangkung | 17 Mei 2019 Pukul 10.30 | Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dalam program KOTAKU |
| 9. | Sumarni | Masyarakat Kelurahan Kangkung | 17 Mei 2019 Pukul 10.30 | Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dalam program KOTAKU |

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Menurut Nasution (1998) (dalam Sugiyono, 2009 : 226) bahwa observasi sebagai dasar bagi semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati partisipasi masyarakat serta pembangunan infrastruktur di kelurahan Kangkung kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Menurut Tresiana Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada sumber bukan manusia diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri dari tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang bersumber pada UU/Peraturan Pemerintah, artikel jurnal, litelatur, data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan program KOTAKU di Kelurahan Kangkung. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel :

⁴⁹ Tresiana, Novita 2013 Hal 207. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Bandarlampung

Tabel 5. Daftar Dokumentasi

| No | Nama Dokumen |
|-----|--|
| 1. | Keputusan Walikota Kota Bandarlampung No. 974/IV.32/HK/2014 Tentang Peetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandarlampung |
| 2. | Keputusan pejabat pembuat komitmen pengembangan kawasan permukiman berbasis masyarakat Kota Bandarlampung No. 600/06.003/PPK.KOTAKU/III.03/2018 Tentang Penerimaan Bantuan Dana Investasi (BDI) National Slum Upgrading Program (NSUP) Tahun Anggaran 2018 |
| 3. | Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat dengan LKM Bahtera Sejahtera No. 600/06.007/SPK.KOTAKU/III.03/2018 |
| 4. | Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. HK.02.03/SPK-KOTAKU/126/VII/2018 |
| 5. | Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Masyarakat (KPM) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelurahan Kungkung. Pelatihan Coaching Clinic Review Perencanaan |
| 6. | Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan Pelatihan Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2018 |
| 7. | Rekapitulasi Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandarlampung |
| 8. | Rekapitulasi pengurangan Kawasan kumuh di Kelurahan Kungkung |
| 9. | Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kungkung |
| 10. | Pelaksanaan Monitoring yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kelurahan Kungkung |

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2018

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Tresiana merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Kejadiannya meliputi mulai dari penyusunan data, menafsirkan dan menginterpretasikan data. Menyusun data, bearti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Menafsirkan data, bearti memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti.⁵⁰

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis

⁵⁰ Tresiana, Novita 2013 Hal 115. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Bandarlampung

data menurut Miles dan Huberman teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut :⁵¹

1. Tahap Analisis Pertama

Tahap pertama yaitu pengumpulan data, yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi.

2. Tahap analisis kedua

Tahap kedua yaitu reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemilahan, fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Dalam tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Badar Lampung. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan efektivitas Program KOTAKU.

3. Tahap analisis ketiga

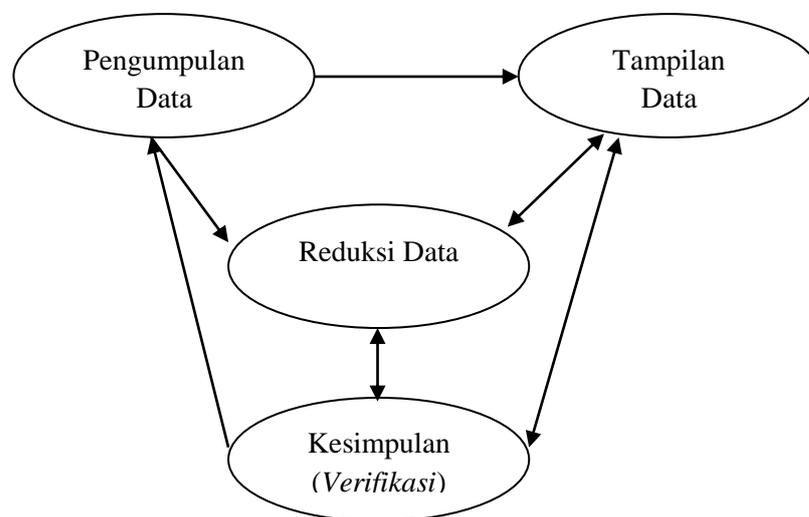
Tahap selanjutnya yaitu tampilan data (*data display*), yaitu kegiatan penyajian data/informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pla tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan.

4. Tahap analisis keempat

Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan, kegiatan pembuatan kesimpulan dalam

⁵¹ Tresiana, Novita 2013 Hal 119. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Bandar Lampung

bentuk narasi atau kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Badar Lampung. Berikut ini merupakan gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman dalam Tresiana : ⁵²



Gambar 2. Analisis Data dan Interaksi antar Komponen
sumber : Tresiana, 2013:119

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria ⁵³

⁵² Tresiana, Novita 2013 Hal 119. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Bandar Lampung

⁵³ Moleong, Lexy J. 2017. Hal 324. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inquiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan hasil hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria ini menggunakan teknik pemeriksaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan dengan pihak pihak terlibat, memperbanyak referensi dan juga menganalisis kasus negated sebagai pembanding. Apapun kegiatan kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya antara lain :

a. Triangulasi

Denzim dalam Moleong (2006:330) mengatakan triangulasi data berarti menggunakan data dari sumber, metode penyidik dan teori. Triangulasi digunakan, karena merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan-kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan wawancara lebih dari satu pihak informan yang berasal dari unsur unsur yang berbeda.

Sugiyono (2009:241) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

b. Perpanjangan Waktu Pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan guna meningkatkan kepercayaan. Dengan perpanjangan pengamatan seperti ini peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lain dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) sehingga tidak ada hal yang disembunyikan lagi.

2. Keteralihan (*transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Menurut Sugiyono pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji

kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak *reliabel* atau *dependable*. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian data (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. Dalam hal ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melibatkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan keswadayaan secara bersama-sama merupakan hal utama untuk menggerakkan program. Dalam pelaksanaan Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kelurahan kangkung berjalan dengan baik meskipun belum maksimal dan belum sepenuhnya mendapatkan pembangunan yang merata. Untuk melihat apakah program berjalan dengan baik atau tidak dibutuhkan suatu pengukuran yang menilai efektivitas program, dimana dalam mengukur efektivitas program diperlukan beberapa tahap diantaranya (1) ketepatan sasaran program ; (2) Sosialisasi Program ; (3) tujuan program; (4) pemantauan program. Dalam 4 indikator pengukuran efektivitas program menurut Sugiyono ketepatan sasaran program dan sosialisasi program menjadi kendala dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kelurahan

Kangkung dimana program KOTAKU sebenarnya belum tepat sebagai langkah dalam menangani kawasan kumuh di Kelurahan Kangkung karena sebagian besar kawasan kumuh di Kelurahan Kangkung merupakan lokasi squater sehingga program KOTAKU tidak dapat menangani akibat terkendala legalitas wilayah. Sosialisasi program juga menjadi kendala dalam efektivitas program KOTAKU di Kelurahan Kangkung dimana peran serta masyarakat Kelurahan Kangkung yang masih sangat rendah, kurangnya partisipasi masyarakat serta kerjasama yang baik dalam menjalankan program menjadikan tahap ini belum dapat berjalan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran program KOTAKU dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kelurahan Kangkung belum berjalan efektif.

2. Dalam menjalankan program KOTAKU di Kelurahan Kangkung tentu terdapat faktor yang mendukung dan juga menghambat program ini dimana faktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Kangkung adalah pendanaan yang mudah sehingga dengan tertata nya anggaran dana menjadikan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung tidak terkendala dalam hal kebutuhan bahan baku pembangunan. Namun dengan adanya faktor pendukung tentunya tidak terlepas dengan adanya faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program KOTAKU diantaranya adalah : (1) masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif, (2) Kurangnya Motivasi terhadap program KOTAKU; (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung program KOTAKU di kelurahan Kangkung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berupaya menuangkan saran-saran yang ditujukan kepada beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Kungkung

Diharapkan Pemerintah Kelurahan Kungkung dapat mendukung dan memfasilitasi seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh program KOTAKU. Adanya kerjasama antar pemerintah dengan koordinator program KOTAKU dalam menangani program KOTAKU di Kelurahan Kungkung.

2. Tim Pelaksanan dan Relawan Program KOTAKU

- a. Diharapkan seluruh anggota yang terlibat dalam program KOTAKU dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan dan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hal tersebut bertujuan agar program KOTAKU dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
- b. Pelibatan perempuan dalam perencanaan kegiatan. Bahwa setelah melakukan penelitian di Kelurahan Kungkung hanya bapak bapak yang di ajak untuk berdiskusi setiap ada kegiatan. Hal ini akan di khawatirkan akan menjadi bias gender dalam pembangunan.
- c. Program KOTAKU diharapkan lebih banyak juga memberikan bantuan dalam hal pemberdayaan (Skill)

3. Bagi Masyarakat Kelurahan Kangkung

Diharapkan masyarakat Kelurahan Kangkung dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan untuk mensukseskan program KOTAKU dalam mencapai sasaran dan tujuan. Sehingga manfaat dari program KOTAKU dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bersama-sama. Karena pada dasarnya jika seluruh masyarakat berpartisipasi aktif, maka program dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Agustanico Dwi Muryadi. 2017. Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*, ISSN : 2442-3874 Vol. 3 No.1. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
- As'ari, Ruli dan Siti Fadjarani. 2018. Media Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian. *Jurnal Geografi* Vol. 15 NO.1. Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Beby.S.D. Banteng.2015.*Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan Studi Kasus Kota Gorontalo*.Universitas Negeri Gorontalo
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan pengangguran karang taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2 No.1
- Budihardjo, Eko. 1999.*Kota Berkelanjutan*. Penerbit Alumni : Bandung
- Dipta Kharisma, Tri Yuniningsih.2017. Efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Semarang. Universitas Diponegoro
- Djaali,mulyono pudji dan ramly. 2000. Pengukuran dalam bidang pendidikan. Pascasarjana Universitas negeri Jakarta. Jakarta
- Donny Wahyu Wijaya. 2016. Perencanaan Penanganan Kawasa Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas Untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. JIAP Vol 2, No. 1, pp 1-10. ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887.
- Farida Rahim.2008. *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*. Bumi Aksara : Jakarta
- George R. Tery. 2006. Prinsip Prinsip Manajemen. Bumi Aksara : Jakarta

Hasibuan, Malayu S.P 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara : Jakarta

<http://wprdbank.org/> diakses pada 17 april 2019

https://www.bappenas.go.id/files/8913/6508/2376/modul-ii__20090814165601_1.pdf/ diakses pada 16 januari 2019. Pukul 17.30 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016) <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh> - kotaku diakses pada tanggal 29 September 2018 Pukul 20.15 WIB

Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat . (2016). Retrieved september 15, 2018, from <http://kotaku.pu.go.id>: http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/170926_lokasi_kumuh_2594/171003_daftar_lokasi_peningkatan_kualitas_NSUP.

Mahmudi. 2005.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YPN : Yogyakarta

Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung

Meutia, I. F. Waste Bank: The Strategy and Community-Based Environmental Governance. *2nd SHIELD 2017*, 244.

Moleong, Lexy J. 2017.*Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya :Bandung

Pasolong.2013. Teori administrasi publik. Alfabeta. Bandung

Peraturan menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Strategi pelaksanaan kebijakan, implementasi percepatan penanganan kumuh 2016-2019

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Prasetyo, Rindang Bangun dan Muhammad firdaus. 2009.Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. jurnal JEKP Vol 2 no2 mei 2009. Institute pertanian bogor

- Restina, N. 2009. *Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting dan Arah Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat*. Tesis. Institut Pertanian Bogor : Bogor
- Robi Cahyadi Kurniawan. 2018. *Opini : Bandar Lampung Kotaku 2020*. Setia Lampung
- Saputra. 2011. Tradisi Ruwat Laut (Ngumbai Lawok) di Keurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam
- Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*, Cetakan II. Mandar Maju : Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) Jilid 2*. Toko Gunung Agung : Jakarta
- Siti Erna Latifi. 2009. Implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di kabupaten aceh tamiang. Tesis. Universitas lampung. Bandar Lampung
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan Jilid I)* Erlangga : Jakarta
- Tresiana, Novita 2013 Hal 97. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Bandar Lampung
- Ulum, Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press : Malang
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Winardi, 2007. Hal 7. *Manajemen Perilaku Organisasi*, Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Wrihatnolo R. (n.d). 2008. *Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia : Konsep dan Pendekatan*